

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

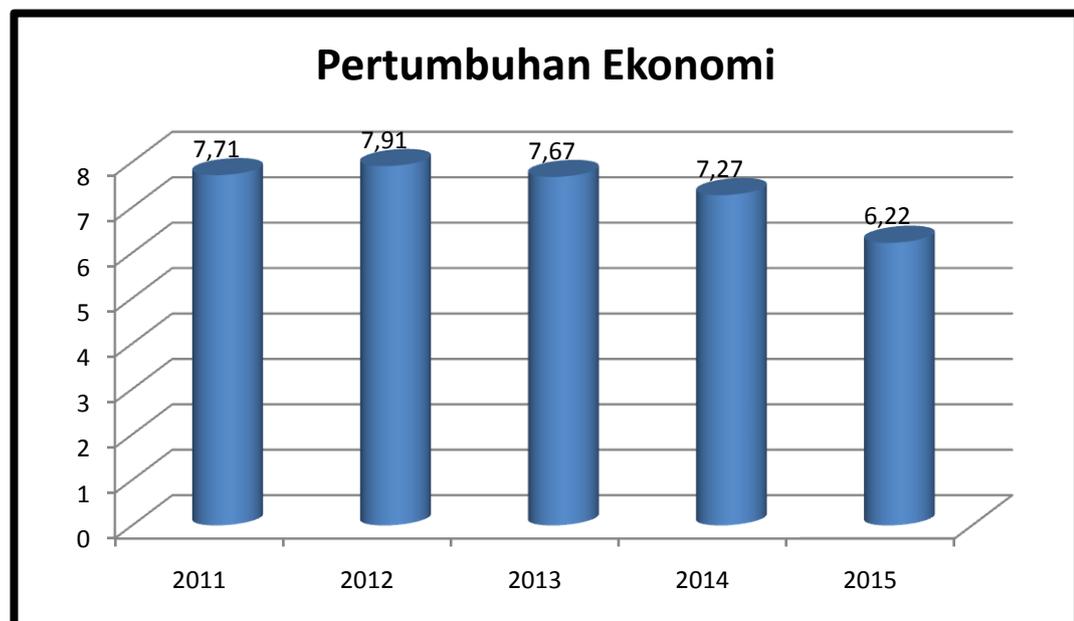
Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah suatu proses perbaikan yang berkesinambungan dari suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kepada kehidupan yang lebih baik, dimana proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat serta harkat dan martabat manusia yang meliputi peningkatan berbagai barang kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup serta perluasan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat (Todaro dan Smith dalam Hendarmin, 2012: 144). Salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai meningkatnya kegiatan ekonomi pada suatu daerah yang akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan kemandirian daerah. Pertumbuhan ini akan terjadi apabila seluruh pemangku kepentingan di daerah bekerjasama dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi seperti meningkatkan investasi. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan di sektor-sektor yang produktif (Arsa, 2015: 23-24)

Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan Gross Domestic Product (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat

pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Menurut Todaro dalam Priana dan Suryanto (2010: 70) bahwa terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah: Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, dan Pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital, kemajuan teknologi

Salah satu pertumbuhan ekonomi yang menarik yakni pada Provinsi Gorontalo karena Provinsi ini merupakan salah satu provinsi yang terbilang masih baru dan sudah memiliki berbagai potensi. Berikut ini digambarkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo selama periode 2011-2015:



**Gambar 1: Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo Periode 2011-2015**

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun 2011 sebesar 7,71% kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi 7,91%. Sementara itu dari tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami penurunan hingga mencapai 6,22%. Penurunan ini diakibatkan oleh penurunan beberapa sektor produk domestik bruto pada Provinsi Gorontalo. Akibat penurunan tersebut maka Provinsi Gorontalo menjadi provinsi yang berada pada urutan kelima provinsi termiskin di Indonesia namun pertumbuhannya menunjukkan hal yang cukup baik.

Masalah mengenai pertumbuhan ekonomi tentunya disebabkan oleh aspek tertentu yang dalam hal ini kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah. Hubungan antara pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi yakni positif sebagaimana dikatakan oleh Mutiara (2015: 104-105) bahwa Pajak Daerah menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah karena pajak daerah berasal dari daerah itu sendiri sehingga dapat membiayai pembangunan daerahnya. Pajak daerah memberikan dampak positif dan signifikan terhadap PDRB. PDRB sendiri merupakan bagian dari perhitungan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah

mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 34 tahun 2004, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam mengali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Masalah pajak daerah suatu daerah dapat dilihat dari keberhasilan pemerintah dalam mencapai realisasi pajak daerah tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1: Pajak Daerah Provinsi Gorontalo periode 2011-2015**

TAHUN	PAJAK DAERAH		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
2011	133.127.278.321	144.753.701.685	108,73
2012	150.012.733.985	168.068.663.005	112,04
2013	183.779.995.351	200.883.464.795	109,31
2014	259.943.069.515	247.137.060.459	95,07
2015	298.758.779.363	260.996.261.660	87,36

Sumber: situs DJPK, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 realisasi pajak daerah mencapai Rp 144.753.701.685,00 dari target yang ditetapkan yaitu Rp 133.127.278.321,00 sehingga persentase capaian pada tahun tersebut sebesar 108,73%. Pada tahun 2012 tingkat presentase mencapai 112,04% yaitu realisasi pajak daerah mencapai Rp 168.068.663.005,00 dari target yang ditetapkan yaitu Rp 150.012.722.985,00 sehingga dapat diketahui bahwa reaslisasi pajak

daerah pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp 18.055.929.020,00. Pada tahun 2013 dapat dilihat bahwa tingkat presentase menurun 109,31% dari tahun sebelumnya dan realisasi pajak daerah mencapai Rp 200.883.464.795,00 dari target yang ditetapkan yaitu Rp 183.779.995.351,00 sehingga dapat diketahui bahwa realisasi pajak daerah pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp 17.103.469.444,00. Pada tahun 2014 dapat dilihat bahwa tingkat presentase mencapai 95,07% yaitu realisasi pajak daerah mencapai Rp 247.137.060.459,00 dari target yang ditetapkan yaitu Rp 259.943.069.515,00 sehingga dapat diketahui bahwa realisasi pajak daerah pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp (12.806.009.056,00).

Pada tahun 2015 dapat dilihat bahwa tingkat presentase mencapai 87,63% yaitu realisasi pajak daerah mencapai Rp 260.996.261.660,00 dari target yang ditetapkan yaitu Rp 298.758.779.363,00 sehingga dapat diketahui bahwa realisasi pajak daerah pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp (37.762.517.703,00). Padahal harapan dari setiap pemerintah tersebut target dan realisasi bisa sejalan ataupun seimbang dengan kondisi dilapangan karena sampai saat ini Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan berbagai upaya dalam hal pemungutan pajak seperti adanya samsat keliling dan samsat pembantu disetiap kabupaten, tapi belum juga memberikan hasil yang optimal.

Selain pajak daerah, salah satu aspek penting yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yakni belanja modal. Darise (2009: 128) mengungkapkan bahwa dalam proses Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Pelayanan publik yang baik dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi suatu daerah.

Belanja modal adalah pengeluaran yang di keluarkan dalam rangka peruntukkan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang

tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, adanya korelasi yang kuat antara share belanja investasi dengan tingkat desentralisasi

Terkait dengan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi maka berikut ini disajikan data belanja modal Provinsi Gorontalo:

**Tabel 1: Belanja Modal Provinsi Gorontalo periode 2011-2015**

TAHUN	BELANJA MODAL		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
2011	148.002.427.892	141.984.542.254	95,93
2012	159.902.148.361	138.397.573.651	86,55
2013	206.857.423.883	184.959.339.603	89,41
2014	269.147.917.318	232.424.743.197	86,36
2015	398.780.423.223	344.244.075.019	86,32

Sumber: situs DJPK, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011-2013 adanya realisasi yang lebih besar atau di atas 90% dari target belanja modal Provinsi Gorontalo. Sementara itu untuk tahun 2013-2015 realisasinya lebih kecil dari target yang ditetapkan. Keadaan belanja modal yang lebih kecil tersebut menyebabkan belanja untuk pembangunan masih lebih kecil atau belum terserap dengan baik, sehingga hal ini menyebabkan 3 tahun terakhir terjadi fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan bahwa adanya senjangan antara harapan yang diinginkan oleh pemerintah daerah dengan kenyataan yang terjadi. Berbagai hal menyebabkan hal ini karena sarana dan prasarana publik yang belum memadai. Sebagaimana diketahui bahwa sarana dan prasarana seperti

jembatan dan jalan masih banyak yang rusak namun alokasi atas sarana ini belum dioptimalkan bahkan cenderung belanja pegawai lebih besar dibandingkan belanja modal. Hal tersebut terjadi karena kurang mampunya pemerintah dalam merealisasikan pajak daerah sehingga pendapatan daerah berkurang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo Periode 2011-2015”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diidentifikasi masalah adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo cenderung fluktuatif bahkan pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup besar vdari empat periode sebelumnya
2. Banyaknya sarana dan prasarana publik yang belum optimal dan alokasi belanja modal yang minim. Serta alokasi belanja tersebut belum sepenuhnya dapat tercapai.
3. Efektifvita pemungutan pajak daerah yang belum optimal sehingga pendapatan asli daerah berkurang.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo periode 2011-2015?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo periode 2011-2015?
3. Apakah pajak daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo periode 2011-2015?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo periode 2011-2015?
2. Untuk mengetahui Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo periode 2011-2015?
3. Untuk mengetahui Apakah pajak daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo periode 2011-2015

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

## 1. Manfaat teoritis

Diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan sumbangan yang positif terhadap ilmu pengetahuan serta sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan meneliti lebih lanjut khususnya mengenai topik pajak daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo

## 2. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian terdiri dari:

### a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pajak daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo periode 2011-2015.

### b. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pajak daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo periode 2011-2015